



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 336 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SE WILAYAH BELAJASUMBA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan wilayah Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung) pada umumnya dan di Provinsi Lampung pada khususnya perlu melakukan peningkatan kerjasarna antara Pemerintah Provinsi khususnya di Wilayah Sumatera Bagian Selatan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur di Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung) Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ' Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007;
7. Peramran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung).
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Pos Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing yang anggota panitia bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG,
NOMOR : G / 336 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 16 April 2009

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SE
WILAYAH BELAJASUMBA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

1. PEMBINA	Gubernur Lampung
2. PENGARAH	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. KETUA	Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
4. WAKIL KETUA	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
5. SEKRETARIS	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung
6. SEKSI-SEKSI	
A. ADMINISTRASI	
Koordinator	Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung
Anggota	1. Kasubbag Monev Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 2. Devi Komalasari Yusri, SE (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) 3. Nandia Isnalia, SIP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) 4. Subono Yudianto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)
B. MATERI DAN PERUMUSAN	
Koordinator	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 4. Kasatker Pengembangan Perkeretaapian Lampung 5. General Manager PT. PLN Persero Wilayah Lampung 6. Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung 7. Kasubbid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung 8. Kasubbid Kerjasama Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung

	9. Staf Bappeda Provinsi Lampung 10. Staf Bappeda Provinsi Lampung
C. TRANSPORTASI Koordinator Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 2. Kasubbag Administrasi Pengembangan Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 3. Staf Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
D. ACARA, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI Koordinator Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung 1. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. 2. Kasubbag Upacara dan Tamu Biro Umum Setdaprov Lampung
E. PERLENGKAPAN Koordinator Anggota	Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung 1. Kepala Bagian Umum dan Sandi Biro Umum Setdaprov Lampung 2. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Biro Umum Setdaprov Lampung 3. Kasubbag Urusan Dalam Biro Umum Setdaprov Lampung 4. Subono Yudianto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung). 5. Iwan Susanto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)
F. KONSUMSI Koordinator Anggota	Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Lampung 1. Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 2. Rita Purnama (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) 3. Asmalah Dewi (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) 4. Anita Rahman (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)

G. KEAMANAN	
Koordinator	Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Anggota	1. Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2. Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
H. PENERIMA TAMU	
Koordinator Hotel Sheraton	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung
Koordinator	Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah
Anggota	Setdaprov Lampung 1. Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 2. Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 3. Kasubbag Monev Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 4. Bagus Harisma Bramado, SSTP. (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung) 5. Muhammad Fahri (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)
Mahan Agung	
Koordinator	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung :
Anggota	1. Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 2. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Lampung 3. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 4. Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 5. Kasubbag Monev Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 6. Kasubbag Pengembangan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 7. Kasubbag Administrasi Kekayaan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 8. Kasubbag Perjalanan Pimpinan Biro Umum Setdaprov Lampung 9. Rendi Reswandi, SSTP. (NSU pada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung) 10. Bagus Harisma Bramado, SSTP. (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)

Balai Keratun Koordinator Anggota	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung 2. Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 3. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 5. Kepala Bagian Administrasi Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 6. Kasubbag KDH dan DPRD Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 7. Syafriyadi, AP., M.Si. (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)
I. PENDAMPING & PEMANDU ROMBONGAN PROVINSI BELAJASUMBA (LO) Koordinator Anggota	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung (Pendamping Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI). 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung (Pendamping Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum RI) 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Pendamping Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI). 4. Kasatker Pengembangan Perkeretaapian Lampung (Pendamping Dirjen Kereta Api). 5. General Manager PT. PLN Persero Wilayah Lampung (Pendamping Dirut PLN Pusat) 6. Ir. Liannurzen (Provinsi Sumatera Selatan) 7. Rachmat Susilo (Provinsi Jambi) 8. Dendy Mashuri, SH., MA. (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) 9. Dinas Pertambangan Provinsi Lampung (Provinsi Bengkulu)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU